



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 31 /2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;

b. bahwa memperhatikan jumlah besarnya dana yang dikelola, beratnya beban Kerja yang ditanggung karena banyak kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu memberikan pelimpahan sebagian kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas-tugas yang dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. membuat perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal.

KETIGA

- : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada prinsipnya sudah berada di luar batas-batas kewenangan yang telah dilimpahkan melalui Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

KELIMA

- : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 dalam hal ini adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 Januari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Barsel di Buntok.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 31 / 2023
TANGGAL : 26 Januari 2023
TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

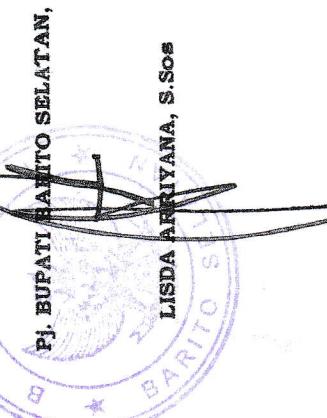
: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
: 188.45 / 31 / 2023
: 26 Januari 2023
: PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN			NILAI PAGU (Rp.)	SUMBER DANA
			2	3	4		
1	2	3	5	6			
1	BILLYSON, ST., MT NIP. 19750728 200003 1 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris Dinas PU/PR Kabupaten Barito Selatan	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		150,000,000.00	DAU
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		25,000,000.00	DAU
			3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		25,000,000.00	DAU
			4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		25,000,000.00	DAU
			5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		25,000,000.00	DAU
			6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		50,000,000.00	DAU
			7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50,000,000.00	DAU
			8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7,499,457,461.00	DAU
			9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		446,200,000.00	DAU
			10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		20,000,000.00	DAU
			11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		25,000,000.00	DAU
			12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		150,000,000.00	DAU
			13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		25,000,000.00	DAU
			14	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		25,000,000.00	DAU
			15	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		50,000,000.00	DAU
			16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		20,000,000.00	DAU
			17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		61,920,000.00	DAU
			18	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		156,590,000.00	DAU
			19	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiann		10,000,000.00	DAU
			20	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiann		15,000,000.00	DAU
			21	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		10,000,000.00	DAU
			22	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		50,000,000.00	DAU
			23	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		113,127,000.00	DAU
			24	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		110,100,000.00	DAU
			25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		25,000,000.00	DAU
			26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		65,000,000.00	DAU
			27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		20,000,000.00	DAU
			28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		200,000,000.00	DAU
			29	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		56,158,906.00	DAU
			30	Fasilitasi Kunjungan Pamu		50,000,000.00	DAU
			31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		300,000,000.00	DAU
			32	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		20,000,000.00	DAU
			33	Pengadaan Alat Besar		1,556,000,000.00	DAU
			34	Pengadaan Mebel		136,369,050.00	DAU
			35	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		128,683,250.00	DAU
			36	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5,000,000.00	DAU

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	REGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)	SUMBER DANA
1		2	3	4	5
3	SAMBELUM, S.ST, MT NIP. 19731003 199303 1 007 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman	1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3 Pembinaan Penyelegaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 4 Penyelegaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 5 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 6 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 7 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 8 Monitoring dan Evaluasi Penyelegaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 9 Identifikasi, Penetapan, Penyelegaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota 10 Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota 11 Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Penguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota 12 Penilikan Terhadap Penyelegaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan 13 Pendaftaran Huruf Daffar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara 14 Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi 15 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Keperluan Strategis Daerah 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 17 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 18 Penataan Bangunan dan Lingkungan 19 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 20 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	8,632,730,000.00 87,500,000.00 30,000,000.00 475,000,000.00 9,005,860,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 1,652,310,000.00 454,000,000.00 50,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,592,400,000.00	6 DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU 122,900,661,000.00
4	MUHAMMAD TAUFIK, ST NIP. 19840210 200604 1 017 Pembina (IV/a)	Kepala Biddang Bina Marga	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelegaraan Jalan dan Jembatan 2 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 3 Pembangunan Jalan 4 Pelebaran Jalan Menuju Standar 5 Rekonstruksi Jalan 6 Pemeliharaan Rutin Jalan 7 Pembangunan Jembatan 8 Rehabilitasi Jembatan 9 Pemeliharaan Rutin Jembatan 10 Pemantauan dan Evaluasi Penyelegaraan Jalan/Jembatan 11 Pengawasan Teknis Penyelegaraan Jalan/Jembatan 12 Pembangunan Jalan Strategis Desa 13 Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	1,032,895,500.00 600,000,000.00 9,000,000,000.00 2,000,000,000.00 81,140,200,000.00 1,520,000,000.00 1,195,000,000.00 50,000,000.00 1,011,829,500.00 6,200,735,000.00 4,950,000,000.00 6,300,000,000.00 122,900,661,000.00	DAU DAU DAU DAU DAU+DAK DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU
5	ARMADI, ST., MM NIP. 19691015 200604 1 015 'Pe Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Biddang Sumber Daya Air	1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 2 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku 3 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00	DAU DAU DAU

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN		NILAI PAGU (Rp.)	SUMBER DANA
			4	5		
1		3	4 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya 6 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 7 Normalisasi/ Restorasi Sungai 8 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota 9 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 13 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi irigasi dan Rawa 14 Pembangunan Jaringan Irigasi Pernmuakaan 15 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa 16 Peningkatan Jaringan Irigasi Pernmuakaan 17 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa 18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 19 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pernmuakaan 20 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	16,218,108,000.00	6	DAU
6	HAWINU, ST., M. Eng NIP. 19781013 200502 1 004 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	1 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 2 Penyiapan Instruktur/Asesor /Penyelegaraan Pelatihan 3 Penyiapan SOP Penyelegaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 4 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 5 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 6 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 7 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 8 Pemanfauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 9 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 10 Perwidaean Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 11 Penyelegaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPAKI 12 Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU 13 Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur 14 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 15 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 16 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 17 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi 18 Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi 19 Penyusunan Data dan Informasi Terlibat Penyelegaraan Pekerjaan Konstruksi 20 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelegaraan IJUK Nasional di Kabupaten/Kota 21 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	644,000,000.00 300,000,000.00 500,000,000.00 3,700,000,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 550,000,000.00 500,000,000.00 1,970,000,000.00 200,000,000.00 1,190,000,000.00 5,739,108,000.00 100,000,000.00 500,000,000.00	5	6

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN			NILAI PAGU (Rp.)	SUMBER DANA
			4	5	6		
1		2	3				
7	ARIEF PURWONO, SP., MT NIP. 19690822 200003 1 012 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Penataan Ruang	22 Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Permantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional 23 Permantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan 24 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelegaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelegaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 25 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelegaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	14,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 385,000,000.00 1,114,200,000.00	DAU DAU DAU DAU DAU DAU		
			1 Pelaksanaan Perselejuran Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 2 Pelaksanaan Perselejuran Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTK Kabupaten/Kota	15,000,000.00 30,000,000.00	DAU DAU		
			3 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 4 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTK Kabupaten/Kota 7 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 8 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 9 Sistem Informasi Penataan Ruang 10 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	30,000,000.00 60,000,000.00 250,000,000.00 1,554,934,000.00 15,000,000.00 140,000,000.00 100,000,000.00 245,066,000.00 2,440,000,000.00	DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU		
			T O T A L	230,226,806,781.00			

PJ. BUPATI BANTO SELATAN,

 LISDA ANRIYANA, S.Sos

